

ABSTRAK

Malioboro merupakan jantung Kota Yogyakarta, yang mana di kawasan tersebut terpusat segala kegiatan pelayanan baik barang maupun jasa. Malioboro pun menjadi pusat perekonomian, pemerintahan dan wisata di Kota Yogyakarta. Jadi dari kawasan tersebut menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha mengembangkan kawasan tersebut untuk memaksimalkan PAD yang ditargetkan. Untuk mewujudkan pengembangan Malioboro yang banyak di kunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara pemerintah Kota Yogyakarta harus bisa membuat kawasan Malioboro ini menjadi kawasan yang menarik dan nyaman untuk di kunjungi. Selain wisatawan, investor pun penting dalam mengembangkan kawasan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai macam terbosan, seperti melakukan proses kolaborasi dari elemen, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka mengelola dan menata kawasan Malioboro supaya menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplorasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Penataan Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, sudah menunjukkan, Proses kolaborasi yang baik, realitas tersebut dapat dilihat dari proses kolaborasi yang melibatkan pihak pemerintah dengan non-pemerintah yang berlangsung secara demokratis yang diwujudkan dengan musyawarah mupakat. Proses kolaborasi dilakukan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung serta membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi, dan berbagi informasi antar aktor yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengelolaan kawasan Malioboro. Kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Malioboro menghasilkan konsensus yang terwujud dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada beberapa evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan insinsitas *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan Malioboro. *Pertama*, Perlu meningkatkan SDM dalam segi kualitas dan kuantitas pegawai UPT Malioboro, karena selama ini jumlah karyawan UPT Malioboro tidak sebanding dengan jumlah Masyarakat (Paguyuban) sehingga proses penyaringan aspirasi/input dari masyarakat dapat maksimal. *Kedua* Perlu meningkatkan partisipasi masyarakat (Paguyuban) dalam proses pengelolaan kawasan Malioboro. *Ketiga* Perlu adanya pemberian insentif bagi LPKKM dan Paguyuban yang aktif berperan dalam pengelolaan kawasan Malioboro guna meningkatkan kinerja dari pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Kawasan Malioboro*